**Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang Klarifikasi Ketidakhadiran Rapat Forum Perangkat Daerah Bidang PUPR**

Pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan  Press Release Klarifikasi terhadap pernyataan Gubernur Kalimantan Barat Tentang Ketidakhadiran Kabupaten Bengkayang pada acara Rapat Forum Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Rabu (6/3/) lalu, di Pontianak.

Dalam sebuah pemberitaan di media elektronik, siaran TV lokal Kalbar menyebutkan dinas PUPR Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Melawi tidak ikut mengakhiri undangan tersebut.

Kemudian, dalam segmen wawancara bersama Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyebutkan kedua Kabupaten yang tidak hadir dalam Acara Forum Perangkat Daerah bidang PUPR tersebut , tidak akan di urus. Sebab menurut Midji, Kabupaten yang tidak hadir dianggap sudah mampu mengurus daerahnya.

Dalam pernyataan Sutarmidji juga memastikan kedua Kabupaten yang tidak hadir, mulai tahun depan tidak akan diberikan bantuan, dan hanya membantu kabupaten yang dianggap mau berkoordinasi. Sutarmidji juga mengancam tidak akan menghadiri dan membuka acara Forum Perangkat Daerah bidang PUPR selama menjabat sebagai gubernur Kalbar, jika di undang dinas PUPR Bengkayang dan Melawi.

"Saya menyayangkan ada dua kabupaten yang tidak hadir, yaitu Bengkayang dan Melawi. Lah bagaimana kita mau tau kebutuhan mereka, sedangkan mereka tidak hadir, ya udah tahun depan kita tidak mengurus urusan mereka. Karena mereka sudah bisa mengurus daerahnya sendiri. Ya udah kita ga usah urus. Kalau saya gampang saja, yang mau Koordinasi kita Koordinasi. Kalo tidak ya jalan sendiri," ungkap Midji pada Rabu (6/3) lalu di Ruai TV.

Atas pemberitaan tersebut, kemudian di bagikan di berbagai media sosial, dan menjadi Viral.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bengkayang, Aleksius, S.Sos.,M.Si  mengklarifikasi hal tersebut. Pasalnya, pada hari itu dari Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang  ada menghadiri pembukaan Acara Forum Perangkat Daerah bidang PUPR. Ketidakhadiran mereka pada pembukaan bukanlah hal di segaja, akan tetapi hanya terlambat masuk 10-15 menit pada acara pembukaan yang dihadiri oleh Gubernur Kalbar, kemudian tidak diperkenankan untuk mengikuti acara pembukaan oleh petugas.

"Perlu kami sampaikan bahwa kami bukannya tidak hadir, akan tetapi karena ada keterlambatan sepuluh atau lima belas  menit saja dari jadwal yang sudah ditentukan,  dan tidak diperkenankan untuk masuk karena acara sudah mulai berlangsung," tegas Aleksius saat melakukan klarifikasi penyataan Gubernur Kalbar,  Senin (11/3) diruang Dinas Kominfo.

Ia mengungkapkan bahwa, dari Dinas PUPR ditugaskan  kepada tiga Kepala Bidang beserta kasi atau staf dan 1 Kasubbag Renja Sekretariat Dinas PUPR yang berjumlah 7 orang seperti Surat tugas terlampir.

Kemudian dalam Surat undangan tersebut acara pembukaan dimulai pada pukul 08.00 Wiba, sementara acara pokok berupa paparan dan desk dimulai pada pukul 09.00 Wiba hingga selesai.

"Tim Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang tiba ditempat acara sekitar pukul 08.10 Wiba dan langsung mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia. Selanjutnya tim meminta ijin untuk masuk dalam ruangan tempat acara berlangsung namun tidak diperkenankan masuk oleh petugas keamanan (Polpp), dengan alasan bahwa acara pembukaan telah berlangsung," ungkapnya.

Setelah acara pembukaan selesai dilanjutkan dengan acara pokok pukul 09.00 Wiba, Tim Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang mengikuti acara tersebut hingga selesai pada pukul 17.00 Wiba.

"Itu dapat dibuktikan dengan penandatanganan berita acara desk untuk masing masing bidang (Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang)," kata Aleksius.

Karena viralnya, di media terkait keterlibatan tersebut, masyarakat Bengkayang merasa kecewa dan mengundang berbagai argument. Terutama Masyarakat kabupaten Bengkayang, yang merasa bahwa ulah satu orang, yang terdampak ratusan jiwa.

 Sehingga, atas berbagai asumsi tersebut (dimasyarakat) Kadis PUPR melakukan klarifikasi terhadap media.

"Atas Kejadian dan keterlambatan itu, maka kami dari Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang menyampaikan permohonan maaf kepada Masyarakat Kabupaten Bengkayang, Kepada Bupati Kabupaten Bengkayang, Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang dan Kepada Bapak Gubernur Kalimantan Barat. Permohonan maaf ini kami lakukan atas keterlambatan kami dalam mengikuti pembukaan kegiatan Rapat Forum Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang pada tanggal 6 Maret 2019," ucapnya.

Aleksius berharap, kerjasama dan hubungan pemerintah Provinsi untuk Bengkayang tetap berjalan. Karena bagaimanapun, Gubernur mampu menjadi payung  untuk mendukung stabilitas daerah.

"Kami sangat memerlukan perhatian dan

pembangunan Pemprov untuk bidang Insfratruktur. Apalagi Bengkayang ini masih berstatus Kabupaten tertinggal," ucapnya.

Kemudian, Alek juga mengatakan biarlah hal tersebut sebagai pembelajaran kedepannya. Supaya tidak terlambat, dan disiplin.